

**EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF J
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013
(Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

REZA FAHRIZAL AKBAR

135010107111102



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi :

**EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF J
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013
(Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Reza Fahrizal Akbar**
 - b. NIM : 135010107111102**
 - c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**
- Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH.,MH
NIP. 19590717 198601 1 001

Dr. Abdul Madjid, SH.M.Hum
NIP. 195901261987011001

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

Lutfi Effendi, SH., MHum.
NIP. 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi :

**EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF J
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013**

(Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Reza Fahrizal Akbar**
 - b. NIM : 135010107111102**
 - c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**
- Jangka waktu Penelitian : 4 Bulan**

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH.,MH
NIP. 19590717 198601 1 001

Dr. Abdul Madjid, SH.M.Hum
NIP. 195901261987011001

Mengetahui

**Ketua Bagian,
Hukum Administrasi Negara**

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, SH., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih karunia yang tiada henti. Tanpa bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan lancar. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang berjudul **“EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF J PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok)”**, baik berupa saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian Skripsi, diantaranya:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran proses penelitian
2. Bapak Rachmad Safa'at S.H. M. Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk mengembangkan penulisan Skripsi
3. Bapak Lutfi Effendi SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Administrasi Negara yang telah mengesahkan ijin penelitian sehingga dapat terlaksana
4. Bapak Agus Yulianto, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing penulis selama penulisan penelitian Skripsi
5. Dan Bapak Dr. Abdul Madjid, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu sabar mendukung kelancaran pelaksanaan penulisan Skripsi
6. Teman-teman, kerabat, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh dalam membantu penulisan ini sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis

Penulis yakin bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan bahasan yang lebih mendalam. Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 15 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM	13
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	13
1. Pengertian Efektivitas Hukum	13
2. Teori-teori Efektivitas.....	16

B. Sanksi Administrasi	17
1. Pengertian Sanksi Administrasi	17
2. Jenis-jenis Sanksi Administrasi	18
3. Macam-macam Sanksi Administrasi.....	18
4. Sanksi yang diberikan pada Narapidana dan Tahanan yang melanggar Pasal 4 Huruf J Permenkum HAM	23
C. Narapidana	24
1. Pengertian Narapidana.....	24
2. Hak Narapidana	25
3. Kewajiban Narapidana.....	26
D. Tahanan	27
E. Alat Elektronik (<i>handphone</i>)	27
F. RUTAN (Rumah Tahanan Negara)	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Alasan Lokasi Penelitian	33
D. Jenis Dan Sumber Data	33
E. Teknik Memperoleh Data.....	34
F. Populasi dan Sampel	36

G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Definisi Operasional	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum RUTAN Kelas IIB Kota Depok	42
1. Sejarah Singkat Rutan Kota Depok.....	42
2. Visi dan Misi Rutan Kota Depok	44
3. Struktur Organisasi Rutan Kota Depok.....	45
B. Pelaksanaan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ..	46
C. Upaya dan Kendala dalam Penerapan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	60
1. Upaya-upaya.....	60
2. Kendala.....	61
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Tempat Penyitaan <i>Handphone</i>	49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Orisinalitas	7
1.2 Daftar Nama Badan Pemeriksa Rutan Kelas IIB Depok	38
1.3 Daftar Nama Warga Binaan Kelas IIB Depok	39
1.4 Jumlah Narapidana dan Tahanan Di Rutan Kelas IIB Depok	50
1.5 Perkara Tahanan Di Rutan Kelas IIB Depok.....	51
1.6 Perkara Narapidana Di Rutan Kelas IIB Depok.....	52
1.7 Pelanggaran yang dilakukan Narapidana dan Tahanan Di Rutan Depok	53
1.8 Alasan dilakukannya Pelanggaran oleh Narapidana dan Tahanan	55
1.9 Sanksi Administrasi yang diberikan terhadap Narapidana dan Tahanan	57
1.10 Narapidana dan Tahanan yang Melakukan Pengulangan Pelanggaran.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1.1 Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Depok	45

RINGKASAN

Reza Fahrizal Akbar, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Desember, 2017, Efektivitas Larangan Dalam Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok), Agus Yulianto, SH.MH dan Abdul Madjid, SH.M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tidak berjalan efektif mengenai larangan pasal 4 huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Bagi Narapidana dan Tahanan yang Membawa Alat Elektronik di Rumah Tahanan Negara yang di latar belakang dengan permasalahan sanksi administrasi bagi pelanggar tata tertib di dalam Rumah Tahanan Negara Kota Depok yaitu larangan untuk membawa alat elektronik berupa handphone ke dalam Rutan Depok.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut : (1) Apakah Pelaksanaan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sudah berjalan efektif ? (2) Bagaimana upaya dan kendala dalam penerapan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara?

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dimaksud yuridis sosiologis yaitu digunakan untuk mengkaji yang lebih menekankan pada aspek-aspek hukum dalam penjatuhan Sanksi Administrasi bagi Narapidana dan Tahanan yang melanggar tata tertib di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Rumah Tahanan Negara bagi Tahanan dan Narapidana yang membawa alat elektronik (*handphone*) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok. Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok karena di dalam Rutan ini tidak hanya berisikan tahanan saja tetapi juga ada narapidana yang keduanya sama - sama melakukan pelanggaran tata tertib yaitu membawa telepon genggam (*handphone*). Data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan wawancara, penelitian dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2 orang petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok, sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ketua Tim Pemeriksa), Staff KPR (Sekertaris Tim Pemeriksa) dan 10 Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Rutan Kelas IIB Kota Depok. Penulis menganalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan atau menggambarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan lalu data tersebut dipaparkan secara menyeluruh, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan kaidah, teori, dan asas hukum yang diperoleh melalui kepustakaan lalu pada akhirnya ditarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dijelaskan bahwa penjatuhan sanksi administrasi belum berjalan efektif karena masih terdapat beberapa pelanggaran tata tertib yang berlaku di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok.

Kata Kunci : Efektifitas, Larangan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok.

SUMMARY

Reza Fahrizal Akbar, Law of the State Administration, Faculty of Law, Brawijaya University, December, 2017, Effectiveness of Administrative Sanctions In Article 4 Letter J Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2013 Concerning the Procedures of Penal Institutions and State Detention For Prisoners and Prisoners Who Bring Electronic Instruments In House Detention State (Study in State Detention Class IIB Depok City), Agus Yulianto, SH.MH and Abdul Madjid, SH.M.Hum.

In this thesis, the authors raise the issue does not run effectively about the administrative sanctions article 4 letter J Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013 on the Procedures of Penitentiary and State Detention For Prisoners and Prisoners Carrying Electronic Devices in Detention House Country in the background with the problems of administrative sanctions for violators of the rules in the State Detention Depok City that is prohibition to bring electronic devices in the form of mobile phone Rutan Depok.

Based on this background, the authors draw the following formulation of the problem: (1) What is the Implementation of Article 4 Letter J Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013 on the Procedures of Penitentiary and the State Detention Center has been effective? (2) How are the efforts and obstacles in the application of Article 4 Letter J Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. 6 of 2013 on the Procedures of Penitentiary and the State Detention Center can be effective?

In this thesis the authors use sociological juridical approach method, the sociological jurisdiction is used to examine the more emphasis on the legal aspects in the imposition of Administrative Sanctions for Prisoners and Detainees who violate the rules in the State Detention Class IIB Depok City as well as the listed in Article 4 Letter J Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2013 on the State Prisoners' Condemnation for Prisoners and Prisoners carrying electronic devices (mobile phones) in the State Detention Class IIB Depok. The location of this research was conducted in State Detention Class IIB Depok because in this Rutan not only contain prisoners but also there are inmates who both do the same violation of order that is carrying mobile phone (handphone). The data in this thesis consists of primary data and secondary data. This data collection technique by conducting interviews, research and literature study. The population in this research is 2 officers of State Detention Unit Class IIB Depok City, the sample in this research is the Head of Security Unit of Rutan (Head of Examination Team), KPR Staff

(Sekertaris Tim Pemeriksa) and 10 Penitentiary Residents who violate the rules in Rutan Class IIB Depok City. The author analyzed using qualitative descriptive technique, that is by describing or describing the data obtained from the results of field observations and then the data presented thoroughly, then analyzed and interpreted with rules, theories, and legal principles obtained through the library and then drawn the conclusions and obtained answers to the issues discussed.

Based on research conducted by the author, it can be explained that the imposition of administrative sanctions has not been effective because there are still some violations of the rules that apply in the State Detention Class IIB Depok City.

Keywords: *Effectiveness, Prohibition, State Detention Class IIB Depok City.*